

PUBLIK

Kemenag Luncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Keagamaan Pertama di Indonesia, Langkah Besar Menuju Madrasah Inklusif!

Agung widodo - SEMARANG.PUBLIK.CO.ID

Feb 1, 2025 - 09:50



Kabupaten Semarang- Langkah progresif dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Semarang dengan mendirikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan, yang menjadi ULD pertama di lingkungan Kemenag se-Indonesia. Jum'at (31/01/2025).

Unit ini bertugas mendampingi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di empat madrasah yang tersebar di tiga kecamatan, yakni MIN 5 Semarang (Kecamatan Jambu), MI Ma'arif Keji, MTs NU Ungaran (Kecamatan Ungaran Barat), dan MI Tarbiyatul Aulad Jombor (Kecamatan Tuntang). Keempat madrasah ini telah menerapkan sistem pendidikan inklusif dengan menyediakan ruang asesmen, layanan individual, Guru Pembimbing Khusus (GPK), serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Peluncuran ULD ini merupakan bentuk komitmen Kemenag dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi Layak bagi Penyandang Disabilitas, yang sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang hak pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ULD akan menjalin kemitraan strategis dengan Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) dan komunitas sipil untuk memastikan keberlangsungan program ini. Ketua FPMI Kabupaten Semarang, Mochamad Arifin, menegaskan pentingnya pendidikan inklusif di madrasah.

Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terwujudnya madrasah ramah anak dan inklusif. Ini adalah komitmen nyata FPMI Kabupaten Semarang dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua," ujar Arifin dalam Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif bertema "Pendidikan Bermutu untuk Semua", yang digelar di Pendopo Bupati Semarang, Sabtu (25/1/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024.

Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, yang hadir sebagai keynote speaker, menyatakan dukungan penuh Pemkab Semarang terhadap pendidikan inklusif.

"Pemerintah Kabupaten Semarang berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus bagi kelompok disabilitas, termasuk dalam pendidikan. Kami juga menyiapkan beasiswa bagi peserta didik penyandang disabilitas hingga jenjang perguruan tinggi melalui APBD," kata Ngesti Nugraha.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Semarang, Ta'yinul Biri Bagus Nugroho, menegaskan bahwa isu disabilitas di lingkungan Kemenag harus mendapatkan perhatian serius.

"Isu ini perlu disebarluaskan ke berbagai lini, mulai dari madrasah, rumah ibadah, hingga layanan calon pengantin. Kami juga menyiapkan panduan serta materi khotbah terkait disabilitas, agar seluruh elemen di Kemenag dapat memiliki pemahaman yang tepat," ujarnya.

Akademisi UIN Salatiga, Lilik Suryanti, turut menyoroti pentingnya sinergi antara

perguruan tinggi dan madrasah inklusif agar pendidikan inklusif dapat terus berkembang.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Eka Prastama Widiyanta, menekankan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih ramah dan non-diskriminatif.

"Keberadaan ULD ini adalah langkah konkret bagaimana agama hadir untuk semua, termasuk anak-anak disabilitas. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga tentang menghapus stigma dan membuka akses yang lebih luas bagi mereka," jelasnya.

Ketua FPMI Pusat, Supriyono, juga memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini. Seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta ini turut menampilkan kemampuan siswa disabilitas di madrasah, seperti hafalan Al-Qur'an dan musikalisasi puisi.

Direktur KSKK Madrasah Kemenag, Nyayuk Khodijah, menegaskan bahwa Kementerian Agama terus mendorong madrasah agar menjadi tempat belajar yang aman dan menyenangkan bagi semua anak.

"Pembukaan ULD pertama di lingkungan Kemenag menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Ini adalah bagian dari program prioritas nasional Kemenag," ujar Nyayuk.

Dengan adanya ULD pertama di lingkungan [Kemenag](#) ini, diharapkan semakin banyak madrasah di Indonesia yang mengadopsi sistem pendidikan inklusif. Langkah Kabupaten Semarang ini bisa menjadi model bagi daerah lain untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan adil bagi semua anak, tanpa terkecuali.

Inilah bukti nyata bahwa pendidikan adalah hak bagi semua, dan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh ilmu!